



**WALI KOTA SIBOLGA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA**  
**NOMOR 77 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SIBOLGA**  
**TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sibolga Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

19. Peraturan Menteri...

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak);
22. Surat Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor 050/624/Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SIBOLGA TAHUN 2023-2026.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah otonom. Unsur penyelenggara.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sibolga.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PMK, PP dan PA, adalah Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Sibolga.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
11. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

*12. Rencana Aksi...*

12. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah Dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
13. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Petunjuk Teknis KLA adalah Dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Kota Layak Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA meliputi:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

### Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak.

*BAB III.....*

**BAB III**  
**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK**

**Pasal 4**

- (1) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Daerah Kota Sibolga Tahun 2023-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak terdiri atas Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH**  
**KOTA LAYAK ANAK**

**Pasal 5**

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan serta Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun melalui Rapat Koordinasi Gugus tugas KLA.
- (3) Menyusun Laporan pelaksanaan KLA dan dilaporkan melalui Ketua Gugus Tugas KLA.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN DAN SASARAN**

**Pasal 6**

- (1) Strategi kebijakan KLA dengan pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangun mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan

**Pasal 7**

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir
- (2) Sasaran antara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Lembaga eksekutif
  - b. Lembaga rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara perwakilan pemerintahan daerah; rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
  - c. Lembaga yudikatif
  - d. Organisasi non pemerintah
  - e. Dunia usaha; dan
  - f. Masyarakat
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. keluarga; dan
  - b. anak

*BAB VI.....*

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Gugus Tugas KLA**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok Gugus Tugas KLA**  
**Pasal 9**

**Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :**

- a. Pembina :
  1. menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan KLA; dan
  2. mengkoordinir gugus tugas kota layak anak dalam penyusunan kebijakan KLA
- b. Pengarah :
  1. menggalang sumber daya dan mitra potensial KLA;
  2. merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program KLA;
- c. Ketua :
  1. Mengkoordinasikan program-program organisasi perangkat daerah yang terkait dengan anak dalam KLA;
  2. memberikan arahan teknis kepada gugus tugas KLA;
  3. mengkoordinir gugus tugas kota layak anak dalam menyusun kerangka dasar dan kerangka kebijakan KLA di Kota Sibolga; dan;
  4. mengkoordinir gugus tugas kota layak anak dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait KLA.
- d. Wakil Ketua :
  1. membantu ketua dalam hal mengkoordinasikan program-program dari organisasi perangkat daerah yang terkait dengan KLA;
  2. melakukan monitoring pelaksanaan program yang terkait dengan KLA;
  3. mengkoordinasikan penganggaran program yang terkait dengan KLA;
  4. membantu ketua gugus tugas dalam menyusun arahan teknis kepada personil tim terkait KLA;
  5. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas terkait penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan KLA;
  6. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas kota layak anak terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan KLA;
- e. Sekretaris :
  1. membantu ketua dalam penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan KLA; dan
  2. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas kota layak anak terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan KLA.
- f. Koordinator Kluster :
  1. mengkoordinir penyusunan program yang terkait dengan KLA sesuai dengan bidangnya;
  2. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan sesuai dengan bidangnya terkait KLA.

*Bagian Ketiga....*

**Bagian Ketiga**  
**RAD KLA**  
**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2023-2026.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembangaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak**  
**Pasal 11**

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan dan Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 (lima) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
  - a. pembentukan peraturan/kebijakan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
  - b. fasilitasi kepemilikan akta bagi anak serta penyediaan fasilitas informasi layak anak di Kecamatan, Kelurahan;
  - c. pelayanan kesehatan dasar, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. pelayanan Pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

*BAB VIII....*

**BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal, 05 Desember 2023

**WALI KOTA SIBOLGA,**

dto.

**JAMALUDDIN POHAN**

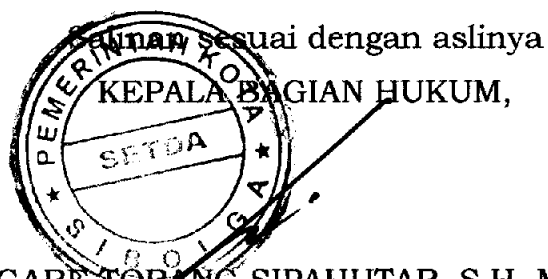
Diundangkan di Sibolga  
Pada tanggal 05 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,**

dto.

**MHD. YUSUF BATUBARA**

**BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 544**



**GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.**  
NIP.19810705 200804 1 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 77 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK  
 ANAK KOTA SIBOLGA TAHUN 2023-2026

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I.</b>	<b>KLASTER KELEMBAGAAN</b>										
	Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak	Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	4 Kecamatan dan 17 Kelurahan tersosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak	persen	4 Kec 17 Kelurahan		100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA Bappeda	Sosialisasi Perlindungan Anak
		Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Kota Layak Anak	4 Kecamatan dan 17 Kelurahan tersosialisasi Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak	persen	4 Kec 17 Kelurahan		100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA Bappeda	Sosialisasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	Penguatan Kelembagaan	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah Gugus Tugas KLA Aktif	OPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ormas	Kota Sibolga	40	45	50	60	Dinas PMK, PP dan PA Bappeda	Pemenuhan Hak Anak
		Koordinasi Kecamatan Layak Anak	Kecamatan yang sudah terbentuk Gugus Tugas KELANA	Kecamatan	4 Kec 17 Kelurahan	4	4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA	Pemenuhan Hak Anak
		Koordinasi Kelurahan Layak Anak	Kelurahan yang sudah terbentuk Gugus Tugas KELA	Kelurahan	4 Kec 17 Kelurahan	17	17	17	17	Dinas PMK, PP dan PA	Pemenuhan Hak Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					han						
		Fasilitasi Penyusunan RKPD	Daerah dan Kewilayahan	OPD, Kecamatan dan Kelurahan	35 OPD 17 Kelurahan	35	35	35	35	Bappeda	Fasilitasi Penyusunan RKPD
		Pembinaan UPTD PPA	UPTD PPA	UPTD	-	-	-	-	-	Dinas PMK, PP dan PA	
		Rapat Koordinasi GT KLA	Tiap Kluster	OPD, LM, DU, MM	5	5	5	5	5	Dinas PMK, PP dan PA Bappeda	
		Fasilitasi Data Perlindungan Anak dan Profil Anak	Tabel Data Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas PMK, PP dan PA, GT KLA, BPS	
		Fasilitasi Pembaharuan Profil Anak	Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas PMK, PP dan PA	
		Penyusunan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah Materi KLA	5	10	15	18	20	25	Dinas PMK, PP dan PA	
		Fasilitasi Penguatan KLA	Kec/ Kel	4 Kecamatan 17 Kel	21	21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA	
		Pelatihan PA, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media Online bagi kader PATBM	Jumlah Kader PATBM yang terlatih PA	orang	17	17	17	17	17	Dinas PMK, PP dan PA	
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	Dokumen RKP	Dokumen	1	1	1	1	1	Bappeda	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		(RKP) Bidang Perlindungan Anak									
		Pemantauan Dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas PMK, PP dan PA	
		Melaksanakan Kajian Perlindungan Anak	Dokumen Kajian	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas PMK, PP dan PA dan Bappeda	
		Sosialisasi dan Pelatihan Konvensi Hak Anak	ASN dan Non ASN Disbudpar	Orang	35	60	60	60	60	Dinas PMK, PP dan PA dan Bappeda	Sosialisasi dan Pelatihan Konvensi Hak Anak
	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, Dan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di tingkat Kota dan Kecamatan	Jumlah APSAI	1 Kota , 4 Kecamatan	5	5	5	5	5	Dinas PMK, PP dan PA dan Bappeda	
		Penyediaan Rumah Nyaman Anak	Jumlah Rumah Aman Anak	Unit		4	4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA	
		Sosialisasi tentang Pusat Kreativitas Anak kepada Pengurus LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) di Kota Sibolga	Jumlah LKSA di Kota Sibolga	Unit		4	4	4	4	Dinsos	
		Fasilitasi Penguatan Peran PKK melalui 10	Jumlah Program / Pandauan 10 Program	Dokumen/Lapora	17	17	17	17	17	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Program POKOK PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan.	Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Kelurahan Layak Anak	n							
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Kota	JMPA Aktif	Kota			1	1	1	Kominfo, Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	
		Sosialisasi kepada Mitra tentang Program KLA	Seluruh Pengusaha Anggota KADIN	Pengusaha			10	15	20	Dinas Koperasi, UKM, KADIN	
		Mendorong Pengusaha untuk menyediakan Fasilitas Bermain Ramah Anak (Perusahaan dengan lahan terbuka)	Seluruh Pengusaha Anggota KADIN				10	15	20	Dinas Koperasi, UKM, KADIN	
		Penanganan Gizi Anak	17 Kelurahan	Kelurahan	17	17	17	17	17	Dinkes, BKKBN	
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam fasilitasi rehabilitasi anak dengan disabilitas	Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Sibolga	RBM kecamatan	4	4	4	4	4	Dinsos	
<b>II.</b>	<b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>										

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Anak Yang Memiliki Kutipan Akte Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran	persen	Jumlah Anak 0-17 Tahun					Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Capaian Kepemilikan KIA	persen		90	90	95	95	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
		Kerja sama pembuatan akte kelahiran dengan Disdukcapil	Frekuensi anak yang memiliki akte lahir dan KIA dalam 1 tahun	persen		100	100	100	100	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Yang Tersosialisasikan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	4 Kec 17 Kel		21	21	21	21	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang aman, handal dan bertanggungjawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani			100	100	100	100	Dinas Kominfo	
		Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah Konten ILA yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (media Cetak Digital)		100	110	150	200	Dinas Kominfo	
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Kelurahan yang tersosialisasikan Hak Anak atas ILA	Kelurahan		17	17	17	17	Dinas Kominfo, Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Layanan Perpustakaan Anak Melalui Mobil Perpustakaan Keliling	Lokasi Baca di 17 Kelurahan		17	17	17	17	17	Dinas Perpustakaan	
		Fasilitasi Pojok Baca	Lokasi Baca di 17 Kelurahan	Kelurahan	17	17	17	17	17	Dinas Perpustakaan	
		Layanan Perpustakaan Berbasis inklusi Sosial	Kota/Kecamatan/Kelurahan	Kota Sibolga	22	22	22	22	22	Dinas Perpustakaan	
		Roda Baca	Lokasi Baca di 17 Kelurahan	kel	17	17	17	17	17	Dinas Perpustakaan	
		Kegiatan Pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi	Pelaksanaan Kegiatan	Keg/ Tahun	3	3	3	3	3	Dinas Perpustakaan	
		Pengembangan Perpustakaan berbasis Online	Pembuatan Aplikasi	Aplikasi	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan	
		Penyebaran Informasi lewat Media Sosial/Website	Kota Sibolga	Aplikasi	5	5	5	5	5	Kominfo, Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	
		Fasilitasi Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Radio	Jumlah program siaran	Keg/ Tahun	3	3	3	3	3	Kominfo	
		Pemasangan Wifi di Kelurahan	Jumlah titik pemasangan wifi		17	17	17	17	17	Kominfo	
	Jumlah Layanan Pelaksanaan penyerahan langsung akta kelahiran di Rumah Sakit, Puskesmas dan Bidan berizin pasca bersalin	Akta Kelahiran diserahkan Langsung di Rumah Sakit, Klinik, dan Bidan Berizin pasca bersalin	Tersedianya Pelayanan Penyerahan langsung Akta Kelahiran pasca bersalin bagi anak yang baru lahir tanpa harus melakukan	Layanan	-	1.200	1.300	1.350	1.350	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dalam layanan akta kelahiran terintegrasi berbasis kemitraan menggunakan Aplikasi SIPONCAN	Layanan Akta Kelahiran Kelahiran terintegrasi berbasis kemitraan menggunakan Aplikasi Siponcan	pengurusan atau mengambil akta lahir dari Kantor Dukcapil Kota Sibolga	Fasilitas Kesehatan	-	3 rumah sakit, 5 Puskesmas, 1 Bidan berizin, 1 klinik	4 Bidan Berizin	3 Bidan berizin	2 Bidan berizin	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
	Jumlah Dokumen MOU Pelayanan terintegrasi Akta Kelahiran, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak Pasca Isbat Nikah dengan Pengadilan agama	Menjalin kerjasama dengan pengadilan agama tentang penerbitan dokumen kependudukan setelah isbat nikah yang bertujuan untuk mencatatkan status anak (pengesahan anak) pada akta kelahiran pasca nikah	Tersedianya pelayanan kepada anak yang bertujuan untuk mencatatkan status anak (pengesahan anak) pada akta kelahiran pasca nikah	Dokumen	1	1	-	-	-	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
	Jumlah laporan Pelaksanaan sosialisasi pelayanan akta kelahiran	Sosialisasi kebijakan pelayanan pencatatatan sipil untuk Akta Kelahiran	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengurusan akta lahir terlambat dan solusi dari masalah masalah yang berhubungan dengan pengurusan akta lahir	laporan	-	-	1	1	1	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
	Jumlah Lembaga Pendidikan dalam melakukan monitoring	Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan PAUD dan TK dalam pengurusan Akta	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran dan KIA pada anak tingkat	Lembaga	15	4	10	15	10	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dengan Lembaga Pendidikan SD, PAUD dan TK dalam pengurusan Akta kelahiran bagi calon murid yang belum memiliki Akta Kelahiran	Kelahiran bagi calon murid yang belum memiliki akta kelahiran	PAUD, TK, SD dan SMP								
	MOU kerjasama kepemilikan akta Lahir dan KIA dengan pengusaha di Sibolga	Kartu diskon berbasis kemitraan bagi anak yang memiliki Akta Kelahiran dan memiliki KIA		Dokumen	-	4	2	1	2	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
	Jumlah Dokumen MOU kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan Akta Kelahiran dan KIA sebagai Persyaratan penerimaan murid baru tingkat PAUD, TK SD, dan SMP	Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan menjadikan akta kelahiran dan KIA sebagai persyaratan penerimaan murid baru tingkat PAUD, TK, SD dan SMP		Dokumen	-	1	-	-	-	Dinas Dukcapil Kota Sibolga	
	Terlaksananya pinjam pakai buku anak	Adanya rolling buku buku yang dikoordinasikan perpustakaan keliling	Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Ketersedian taman bacaan	Memperbanyak dan Pengembangan		Taman bacaan	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan	



NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Taaaaaman bacaan dan Perpustakaan Keliling untuk Anak								Kota Sibolga	
	Adanya fasitas perpustakaan keliling untuk anak			Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Adanya penyediaan majalah anak pada dinas perpustakaan Kota Sibolga untuk pengembangan minat baca	Mengembangkan bulletin anak		Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Ketersediaan Taman bermain anak	Taman/ Ruang bermain anak dan sarana olah raga		Taman Bernain anak	-	-	-	1	1	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Tersedianya ruang bermain anak pada Dinas Perpustakaan Kota Sibolga			Ruang bermain anak	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Tersedianya perpustakaan pada 17 (tujuh belas) kelurahan	Perpustakaan Kelurahan		Masyara kat	17	17	17	17	17	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Memberikan informasi kepada masyarakat luas	Adanya hotspot difasilitasi umum, website		Masyara kat	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
	Adanya kesadaran pengusaha Warung internet untuk melarang anak-anak	Melakukan Sosialisasi/penyuluhan ke sekolah atau kepada pengusaha warung internet		Orang	163	150	120	110	90	SATPOL PP	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	
						2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	bermain di warnet pada jam belajar		Tersedianya kegiatan Razia terhadap anak-anak yang berada di warung internet									
	Adanya penindakan terhadap pengusaha warung internet dan anak-anak yang melanggar Perwal No. 48 Tahun 2017	Melaksanakan Patroli dan pengawasan terhadap warung internet										
	Adanya penindakan terhadap pengusaha warung internet dan anak-anak yang melanggar Perwal No. 48 Tahun 2017	Melakukan Razia terhadap anak-anak yang berada di warung internet pada jam belajar dan malam hari sesuai dengan Peraturan walikota No. 48 Tahun 2017										
<b>III</b>	<b>KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>											
	Pelembagaan Partisipasi Anak	Penguatan Kapasitas Forum Anak (FA)	FA yang Aktif	FA se Kota Sibolga		21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	Penguatan Kapasitas Forum Anak	
		Pelatihan FA sebagai Pelopor dan Pelopor (2p)	FA yang Aktif	FA se Kota Sibolga		21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	Penguatan Kapasitas Forum Anak	
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kecamatan/Kelurahan yang melibatkan FA anak dalam PAPP	FA se Kota Sibolga		21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	Penguatan Kapasitas Forum	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Anak
		Penguatan Kapasitas Fasilitator FA	Kecamatan/Kelurahan yang memiliki Fasilitator FA	FA se Kota Sibolga		21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	Penguatan Kapasitas Forum Anak
		Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP)	Jumlah Forum Anak yang terlibat dalam Musrenbang	FA se Kota Sibolga		21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK, Bappeda	Musrenbang
		Fasilitasi Penguatan Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelopor (2P)	Jumlah Forum Anak Yang Terlibat Dalam Penguatan Peran Forum Anak sebagai 2P	FA se Kota Sibolga		21	21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, TP PKK	Penguatan Kapasitas Forum Anak
	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Kampamye Stop Perkawinan Anak	4 Kecamatan, 17 Kelurahan	Keg/Tahun		3	3	3	3	BKKBN	
		Sosialisasi Program Ketahanan Remaja di Kelurahan Kota Sibolga	Pemahaman 4 Substansi GenRe	Keg/Tahun		3	3	3	3	Dinkes	
		Bimbingan Perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	Persen		75	80	80	80	BKKBN	
	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasang			50	50	50	KEMENAG (Bimas Islam)	Penulhan Keluarga

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Pembinaan dan Bimbingan Bagi Keluarga	Kecamatan			4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Sosialisasi & Pembentukan Jejaring PUSPAGA	Kelompok Layana Pembelajaran Keluarga	Kecamatan			4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Konseling Keluarga	Majelis Taklim Ibu-Ibu	Majelis Taklim se Kota Sibolga/ Kecamatan			4	4	4	MUI	
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas ieniang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persen			100	100	100	Cabdis Pendidikan Provsu	
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan	Persentase TK/RA yang memiliki lingkungan kondusif	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		berkualitas ieniang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	dalam pembangunan karakter								
	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendampin, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Persen			100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Sosialisasi Standar Pengasuhan Anak dan	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejaht			4 Kecam	4 Kecam	4 Keca	Dinsos	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		upaya peningkatan kualitas LKSA	Anak (LKSA)	eraan Sosial Anak (LKSA)			ata	ata	mata		
			Pengurus LKSA di Kota Sibolga	Kota Sibolga			4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	Dinsos	
		Fasilitasi Lembaga Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Anak Integratif Atas nama lain di Luar Panti Sosial	Penanganan PMKS berbasis masyarakat, Penguatan Kader PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Pekerja Sosial, Penyuluh social/orang			4	4	4	Dinsos	
		Penguatan Kapasitas Pesantren Dalam Memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah Pesantren yang telah difasilitasi Pembentukan Pesantren Ramah Anak	Pesantren Anak			17	17	17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dinas PMK, PP dan PA,	
			Jumlah Pengasuh Pesantren Yang Dilatih Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren			17	17	17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dinas PMK, PP dan PA,	
	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Jasa Konsultasi Perencanaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Sekolah Se Kota Sibolga (Paud/TK, SD, SMP, SMA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Pemabangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyelenggaraan Operasional Bi Sekolah	Koridor	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Penyelenggaraan Pelatihan SDM untuk Program RASS yang dilatih Konvensi Hak Anak	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/S MA/SMK) atau SDM	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Sekitar Sekolah Berupa Zebra Cross	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/S MA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Penyelenggaraan Operasional Bis Sekolah	Koridor	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Penyelenggaraan Pelatihan SDM untuk Program RASS yang dilatih Konvensi Hak Anak	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/S MA/SMK) atau SDM	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Sekitar Sekolah Berupa Zebra Cross	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/S MA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Penataan Jalur Disabilitras pada Lokasi/Tempat Menyeberang (Zebra Cross)	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/S MA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Sosialisasi Eco Transport (Berjalan Kaki dan Bersepeda) Edukasi Keselamatan (PAUD/TK/SD/SMP/S	Sekolah Se Kota Sibolga (PAUD/TK/SD/SMP/S MA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		MA)									
		Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Sekitar sekolah berupa zoSS	Sekolah Se Kota Sibolga (Paud/TK/SD/SMP/SMA/SMK)	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Pembuatan Peraturan tentang Penyelenggaraan RASS	Perturan	%			50	75	100	Dishub	Penyelenggaraan LLAJ
		Pembangunan/Pemeliharaan Trotoar RASS (Rute Aman Selamat sampai Sekolah	Terbangunnya/Terpeliharanya trotoar di depan sekolah/kawasan menuju sekolah	%			50	75	100	Dishub	Pembangunan/Pemeliharaan Trotoar
	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%			100	100	100	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin
			Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap	%			100	100	100	Dinkes	
			Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	%			100	100	100	Dinkes	
			Persalinan di rumah sakit	%			100	100	100	Dinkes	
			Persentase kunjungan neonatal	%			100	100	100	Dinkes	
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Lengkap	%			100	100	100	Dinkes	
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan triple eliminasi lengkap	Jumlah Puskesmas			5	5	5	Dinkes	



NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kelas Ibu	Jumlah Puskesmas			5	5	5	Dinkes	
			Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%			100	100	100	Dinkes	
			Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis b yang akan dirawat dan dilakukan tindakan	%			100	100	100	Dinkes	
		Meningkatnya KB Pasca Persalinan	Persentase peserta KB Pasca Persalinan	%			100	100	100	Dinkes	
		Kegiatan pelaksanaan pelayanan persalinan di faskes	Jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan	%			100	100	100	Dinkes	
	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase balita yang mendapat kapsul vitamin A	%			100	100	100	Dinkes	
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%			100	100	100	Dinkes	
		Pembinaan kader oleh Puskesmas	Cakupan Puskesmas yang melakukan Pembinaan Kader	%			100	100	100	Dinkes	
		Pemantauan tumbuh kembang balita oleh dokter spesialis anak	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%			100	100	100	Dinkes	
		Peningkatan gizi anak di bawah 2 tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat asi	%			100	100	100	Dinkes	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			eksklusif								
		Skrining malnutrisi gizi pada anak yang ditemukan di rawat inap	Persentase pelaksanaan assesment gizi di rawat inap anak	%			100	100	100	Dinkes	
		Pemantauan tumbuh kembang balita oleh dokter spesialis anak	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%			100	100	100	Dinkes	
		Skrining stunting pada anak yang ditemukan di rawat inap	Persentase penanganan stunting di rumah sakit	%			100	100	100	Dinkes	
		Percepatan Penurunan serta Pencegahan Stunting	Kelurahan Se Kota Sibolga (Lokus Stunting)	%			100	100	100	TPPS Kota Sibolga	
		Percepatan Penurunan serta Pencegahan Stunting	Kelurahan	17 Kel			17	17	17	TPPS Kota Sibolga	
		Percepatan Penurunan serta Pencegahan Stunting	Kota Sibolga	Satuan kerja			30	30	30	TPPS Kota Sibolga	
<b>IV</b>	<b>KLUSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>										
	Status Gizi Balita	Pembinaan BKB	Kelurahan yang Poktan BKB	Kelurahan			17	17	17	Badan KB	
		Pendampingan Keluarga	Keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	%			100	100	100	Dinkes dan Badan KB	
		Pelatihan Bagi Forum Anak Sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah Forum Anak Kec/Kel Ynag Memiliki FA 2P Gizi	%			100	100	100	Dinkes dan Badan KB	
		Pelatihann Bagi	Jumlah Kec/Kel yang	%			100	100	100	Dinkes dan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Forum Keluarga Sebagai 2P dalam Gizi	Sadar Gizi 2P							Badan KB	
	Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 3 Tahun	Kegiatan Kelas Ibbu Balita	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Balita	unit			5	5	5	Dinkes	
			Cakupan Ibu hamil diskriming hepatitis b yang akan dirawat dan dilakukan tindakan	%			100	100	100	Dinkes	
		Pembentukan Tim Penyelamat Ibu dan Bayi dalam mewujudkan Sibolga Salamina (Sibolga Sayangi, Selamatkan Nyawa Ibu dan Bayi)	Kepwal tentang Tim Penyelamat Ibu dan Bayi	Dokumen			1	1	1	Dinkes	
		Meningkatnya KB Pasca Persalinan	Persentase peserta KB Pasca Persalinan	%			55	60	70	Dinkes, RSU, Badan KB	
		Kegiatan pelaksanaan persalinan di faskes	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%			100	100	100	Dinkes, RSU, Badan KB	
		Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita yang mendapat kapsul vitamin A	%			100	100	100	Dinkes, RSU, Badan KB	
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%			100	100	100	Dinkes, RSU, Badan KB	
		Pembinaan kader oleh Puskesmas	Cakupan Puskesmas yang melakukan Pembinaan Kader	%			100	100	100	Dinkes, RSU, Badan KB	
		Pemantauan tumbuh kembang balita oleh	Persentase balita yang dipantau	%			100	100	100	Dinkes, RSU, Badan KB	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dokter spesialis anak	pertumbuhan dan perkembangannya								
		Pelatihan PMBA untuk Kader di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pelatihan kader tentang PMBA	Unit			5	5	5	Dinkes,	
		Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan untuk Kader di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pelatihan kader tentang Pemantauan Pertumbuhan	Unit			5	5	5	Dinkes,	
		Fasilitas peningkatan pemberian ASI Eksklusif	Penyusunan PERWAL ASI	Dokumen			1	1	1	Dinkes, RSU, Badan KB	
		Penyuluhan 1000 HPK Pendampingan Keluarga	1. Kelurahan yang Poktan BKB nya Mendapatkan Pembinaan 2. Keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan				17	17	17	Dinkes, RSU, Badan KB	
	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas Ramah Anak	%			100	100	100	Dinkes,	
		Fasilitasi penyediaan Pelayanan ramah anak di Puskesmas	Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	%			100	100	100	Dinkes,	
		Fasilitasi penyediaan pelayanan ramah anak di RS	Persentase RS Sayang Ibu dan Bayi	%			100	100	100	Dinkes,	
		Pendampingan Keluarga	Keluarga berisiko stunting yang	%			100	100	100	Dinkes,	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mendapat pendampingan								
		Balita memiliki buku KIA	Persen balita yang memiliki buku KIA	%			100	100	100	Dinkes,	
		Pencegahan Infeksi dari Ibu ke Anak	Persen Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Hepatitis	%			100	100	100	Dinkes,	
		Skrining dan Profilaksis TB bagi balita kontak erat penderita TB	Persen balita yang mendapat TPT	%			100	100	100	Dinkes,	
		Deteksi dini dan penanganan pneumomia pada balita	Persentase kasus Pneunomia Balita yang diberikan tata laksana standar (cakupan balita batuk atau kesukaran bernafas atau yang dihitung nafas atau dilihat TDDK dibagi jumlah kunjungan balita dengan batuk atau kesukaran bernafas	%			100	100	100	Dinkes,	
		Penanganan pada diare pada balita	Puskesmas melaksnakan diare sesuai standar (Cakupan pemberian oralit dan ginc 100% pada penderita diare Balita)	unit			5	5	5	Dinkes,	
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada	Jumlah UPTD Puskesmas mampu	unit			5	5	5	Dinkes,	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		anak	melakukan deteksi dini Kesehatan jiwa di sekolah								
		Pemberian Imunisasi lengkap pada anak	Persentase anak mendapa imunisasi lengkap	%			100	100	100	Dinkes,	
		Pengembangan Klinik Rehabilitasi medic yang terintegrasi dengan klinik tumbuh kembang	Klinik Rehabilitasi Medik yang terintegrasi	unit			3	3	3	Dinkes,	
		Peningkatan Kapasitas tempat tidur Rawat Anak	Jumlah TT anak Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit	unit			45	45	45	RSU	
	Lingkungan Sehat	Promosi Kesehatan tentang BPJS	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan tentang PHBS	unit			5	5	5	Dinkes,	
		Peningkatan Kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Capaian persentase akses penduduk terhadap kualitas air minum yang memenuhi syarat	%			90	95	100	Dinkes, PDAM	
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Capaian persentase akses KK terhadap jamban sehat	%			40	50	60	Dinkes, PUPR	
		Pengawasan Lingkungan	Indikator Penataan Pelaku Usaha	%						PKPLH	
		Pengelolaan Sampah	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	%			90	90	90	PKPLH	
		Pengawasan Instalasi	Pelanggan PDAM Kota Sibolga Air Minum dan Instalasi	%			100	100	100	PKPLH	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Air Limbah								
		Sosialisasi Air Bersih dann Penggunaan Air Bagi Pelajar	Pelajar SMA se-Kota Sibolga	Kegiatan			4	4	4	PDAM, Dinkes	
		Sosialisasi Bagi SDM Forum Anak Sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak Sebagai 2P Sanitasi	FA Kecamatan			4	4	4	Dinas PMK, PUPR	
	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (LPS) Rokok	Implementasi KTR	Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan KTR				5	5	5	Dinkes, PUPR	
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi Bahwa Rokok Bagi Anak sebagai 2P				5	5	5	Dinkes, PUPR	
		Penetapan Kawasan Rumah Sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok	Indikator Kawasan Tanpa Rokok	unit			3	3	3	RSU	
		Pemasangan Spanduk, Brosur atau Pamflet	Taman Umum di Kota Sibolga	Taman			2	2	2	Dinkes, PUPR	
		Pengawasan KTR	Se-Kota Sibolga	4 Kecamatan			4	4	4	Satpol PP	
<b>V</b>	<b>KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>										
	Wajib Belajar12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6	PAUD Negeri Swasta			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tahun								
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	Negeri Swasta			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Negeri Swasta			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak Usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 Tahun)				100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA/diatas 50%	Kecamatan			4	4	4	Diknas dan Kebudayaan	
			Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) diatas 52,10%	Kecamatan			4	4	4	Diknas dan Kebudayaan	
			Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan			4	4	4	Diknas dan Kebudayaan	



NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan			4	4	4	Diknas dan Kebudayaan	
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan jejang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Kecamatan dengan APK SMA/MA/SMALB sekurang-kurangnya 95%	Kecamatan			4	4	4	Diknas dan Kebudayaan	
		Bantuan dari pusat untuk sekolah negeri dan swasta baik yang mampu maupun tidak mampu. Program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Sasaran untuk siswa yang bersekolah di Kota Sibolga	SMP se Kota Sibolga	Kecamatan			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	
		Bantuan dari APBD untuk sekolah dan swasta baik yang mampu maupun tidak mampu	SMP se Kota Sibolga	unit			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	
		Bantuan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP),	SMP di Kota Sibolga	unit			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		untuk sekolah negeri dan swasta yang tidak mampu									
		Kegiatan Operasional di Kampung KB	8 Seksi Kampung KB di Kota Sibolga (Keagamaan, Pendidikan dan Sosialisasi), Perlindungan, Kasih Sayang, Sosial Budaya, dan Pembinaan Lingkungan	Jumlah Kampung KB se kota Sibolga			8	8	8	Dinas KB	
	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak				100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
			Persentase Pembelajaran SMPK/SMTK/SMAK yang Ramah Anak	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
			Persentase SMAK yang Ramah Anak	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki Lingkungan Kondusif dalam pembangunan karakter	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Peningkatan Kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		menengah	harapan								
		Pendidikan dan Pembinaan Sekolah Ramah Anak	Persentase TK/KOBER/SDN/SWA STA SMP/SWASTA PKBM	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Fasilitasi SRA	Penggiat SRA Terlatih (Fasilitator SRA)	orang			17	17	17	Diknas dan Kebudayaan	
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (FJAS) di Sekolah	% Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Intervensi Keamanan Pangan di Sekolah (SD, SMP, SMA, Sederajat)	Tersedia Kantin Sehat di Sekolah	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Fasilitasi Pendidikan Pencegahan Narkoba Pada Lembaga Pendidikan	Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran Pencegahan Narkoba	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Pembinaan dan Penghargaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Jumlah Sekolah yang peduli Berbudaya Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata)	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana	Jumlah Sekolah Aman Bencana	%			100	100	100	Diknas dan Kebudayaan	
	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak	Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Usia produktif	Kecamatan se Kota Sibolga	Kecamatan			4	4	4	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	
		Pembangunan Taman Bermain	Se Kota Sibolga	Kecamatan			4	4	4	PUPR	
		Pelatihan dan	Pelaku IKM	Keg/Tah			12	12	12	Dinas Tenaga	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pembinaan Disain Produk bagi pelaku IKM		un						Kerja Koperasi dan UKM	
		Pelatihan dan Pembinaan	IKM Non Sentra	Keg/Tahun			12	12	12	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	
		Menyelenggarakan kompetensi di bidang Kesenian untuk mewadahi ekspresi dan kreativitas siswa	SMP se-Kota Sibolga	SMP			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	
		Menyelenggarakan kompetensi dibidang Olahraga bagi siswa untuk menemukan bibit-bibit baru Indonesia dalam bidang Olahraga.	SMP se-Kota Sibolga	SMP			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	
		Menyelenggarakan kompetensi olahraga sepak bola	SMP se-Kota Sibolga	SMP			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	
		Menyelenggarakan kompetensi di literasi bagi siswa untuk menemukan bibit-bibit baru Indonesia dalam bidang literasi. Utamanya dalam menulis cerpen, membaca puisi, mencipta pantun, mencipta syair serta mendongeng	SMP se-Kota Sibolga	SMP			11	12	12	Diknas dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosialisasi tentang pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN)	Masyarakat Kota Sibolga	Kegiatan			3 Kali	3 Kali	3 Kali	Diknas dan Kebudayaan	
		Pengembangan berupa bercerita untuk anak-anak	SD, TK dan PAUD se-Kota Sibolga	Kegiatan			3 Kali	3 Kali	3 Kali	Dinas Perpustakaan	
		Kegiatan Jambore Budaya Baca dan Festival Duta Baca bekerja sama dengan Pokja Literasi Kota Sibolga	SD dan SMP Kota Sibolga	Kegiatan			3 Kali	3 Kali	3 Kali	Dinas Perpustakaan	
		Pembentukan Pol PP Cilik	Kecamatan (1Kecamatan = 1 SD)	Kecamatan			4	4	4	Satpol PP	
	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%			100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA	
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang Diadvokasi Tentang Perlindungan Anak dan Eksploitasi	Kota Sibolga			21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA	
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Yang Dilatih Tentang Disiplin Positif	Kota Sibolga			21	21	21	Dinas PMK, PP dan PA, POL PP	
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Yang Terlatih Internet Aman	Kota Sibolga			21	21	21	Kominfo	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Kecamatan Yang Mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Kota Sibolga			4	4	4	Satpol PP Dinas PMK, PP dan PA,	
		Pendampingan dan Koordinasi pelayanan bagi anak korban kekerasan dengan Lembaga Terkait	Se-Kota Sibolga	Kota Sibolga			4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Pelatihan Bagi Forum Anak Sebagai 2P Dalam Mencegah Kekerasan	Forum Anak Aktif sebagai 2P dalam kekerasan dan eksploitasi	Kota Sibolga			4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Penguatan Forum Anak dalam mencegah kekerasan dan Eksploitasi		Keg/Tahun			3	3	3	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Pelatihan Bagi Lembaga Layanan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan		Keg/Tahun			3	3	3	Dinas PMK, PP dan PA,	
			Standar Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi				1	1	1	Dinas PMK, PP dan PA	
			Jumlah SDM Unit Layanan Yang Telah Dilatih Manajemen Kasus	orang			4	4	4		
		Konsultasi dan	Frekuensi Edukasi di	Keg			2	2	2	Dinas PMK, PP	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		edukasi oleh Psikolog klinis rumah sakit	ruang tunggu untuk orang tua dan remaja							dan PA	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan	Keg			3	3	3	Dinas PMK, PP dan PA	
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak korban kekerasan	Kebutuhan Dasar Anak Korban Kekerasan Terpenuhi	%			100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA	
		Penataan Rumah Singgah yang Ramah Bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Rumah Singgah yang nyaman dan ramah bagi anak	Unit			4	4	4	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Pendampingan psikososial anak korban	Anak Korban Kekerasan terdampingi psikososialnya	%			100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Asistensi Sosial (ATENSI)	Anak korban kekerasan mendapat asistensi sosial	%			100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Pendampingan Pekerja Sosial untuk Sosial, pendidikan, kesehatan	Terdampinginya anak korban kekerasan dan eksploitasi dari segi sosial, pendidikan, kesehatan	%			100	100	100	Dinas PMK, PP dan PA,	
		Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Rumah Aman yang Nyaman dan aman untuk anak korban	unit			100	100	100	Dinsos, Dinas PMK, PP dan PA	
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan	Tersedianya materi KIE Pencegahan dan Penanganan korban kekerasan dan	Paket/Media			1	1	1	Dinsos, Dinas PMK, PP dan PA	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		eksploitasi	eksploitasi								
		Sosialisasi Pebebasan Anak Dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Pariwisata	%			100	100	100	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan dan Anak Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan Korban, dan Mediasi	Pelayanan Kasus	%			100	100	100	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
		Sosialisasi Pembebasan Anak Dari Eksploitasi Seksual Di Destinasi Wisata	Umlah Kampung Wisata Kreatif Yang Tersosialisasikan Pembebasan Anak dari Eksploitasi	%			100	100	100	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
	Anak yang Dibeaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	%			100	100	100	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
		Sosialisasi Tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang larangan Mempekerjakan Anak Kepada Pengusaha	Pengusaha tidak mempekerjakan anak	kegiatan			2	2	2	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
		Pelatihan Konvensi Hak Anak di Lingkungan Ketenagakeraan yang	Pengusaha, sarikat pekerja dan aparat kewilayahan terlatih Konvensi Hak Anak	kegiatan			2	2	2	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	



NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		melibatkan pengusaha dan sarikat kera serta aparat kewilayahan									
		FGD tentang Penghapusan Pekerja serta Anak dan Bentuk-Bentuk Pekeraan Terburuk Bagi Anak dengan Para Ahli	Strategi dan Program Penghapusan Pekera Anak dan BPTA di Kota Sibolga	kegiatan			2	2	2	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
		Sinergitas Pebcegahan dan Penanganan Pekerja Anak dan BPTA dengan OPD, LSM Peduli Anak, Media, dan Dunia Usaha	Earing Pencegahan dan penanganan Pekerja Anak dan BPTA				2	2	2	Disparpora, Dinas PMK, PP dan PA	
		Pengintegrasian isu pekera Anak	Mengintegrasikan Isu Pekerja Anak Kedalam Indikator Kinejra Utama (IKU) Pemerintah Daerah	kota			1	1	1	Disnaker, Koperasi dan UMKM	
		SDM rumah sakit tidak mempekerjakan anak sesuai UU ketenaga kerja	Persentase karyawan < 18 tahun yang tidak dipekerjakan di RS KIA	%			100	100	100	Disnaker, Koperasi dan UMKM	
	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAFZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Sosialisasi Bahaya NAPZA bagi anak	Umlah UPT Puskesmas mampu melakukan skrining penyalahgunaan NAPZA	Unit			5	5	5	Dinkes	
		Penanganan anak yang terinfeksi	Jumlah Anak Korban Pornografi, NAPZA,	%			100	100	100	Dinkes, RSU	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		HIV/AIDS	dan terinfeksi HIV/AIDS terlayani								
		Pelayanan bagi Anak dengan HIV/AIDS	Jumlah Anak dengan HIV/AIDS yang dilayani di poliklinik VCT/Kemuning	%			100	100	100	Dinkes, RSU	
		Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Untuk Anak Korban NAPZA	Kota Sibolga							Dinkes, RSU	
		Intervensi Ketahanan Keluarga Bebas NAPZA	Kota Sibolga							Dinkes, RSU	
		Dialog Interaktif	Kota Sibolga	kegiatan			2	2	2	Kominfo, Dinkes, Dinas PMK, PP dan PA	
		Dukungan Bantuan Nutrisi bagi Anak terdampak dan terinfeksi HIV AIDS	Anak Terdampak dan terinfeksi HIV/AIDS	%			100	100	100	Dinkes, RSU	
		Dukungan Psikososial bagi Keluarga anak dengan HIV AIDS	Keluarga anak dengan HIV/AIDS	%			100	100	100	Dinkes, RSU	
		Konsultasi dan Edukasi oleh psikologi klinis, konselor HIV dan dokter spesialis kandungan	Persentase penanganan anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS	%			100	100	100	Dinkes, RSU	
		Konsultasi dan edukasi oleh psikologi klinis dan konselor HIV rumah sakit	Persentase penanganan anak korban bencana dan konflik	%			100	100	100	Dinkes, RSU	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosialisasi Internet Aman Untuk di Kecamatan Dengan Kasus Pornografi Yang Tinggi	4 Kecamatan Tersosialisasi Internet Sehat Untuk Anak	Kegiatan			1	1	1	Kominfo	
		Sosialisasi Pencegahan Pornografi	17 Kelurahan	Kegiatan			1	1	1	Kominfo	
	Pelayanan Bagi Anak Korban dan Konflik	Fasilitasi Penanganan Anak korban bencana dan Konflik	Jumlah Anak korban yang diberikan pendampingan sosial	%			100	100	100	BPBD, Dinkes, Dinas PMK, PP dan PA	
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	%			100	100	100	BPBD, Dinkes, Dinas PMK, PP dan PA	
		Penyusunan Perda Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Memiliki Perda Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	dok			1	1	1	BPBD, POL PP	
		Penanganan Anak Korban Bencana dan Konflik	Jumlah Kegiatan Bagi Anak Korban Bencana Yang Diberikan Dukungan Psikososial	%			100	100	100	BPBD, Dinkes, Dinas PMK, PP dan PA	
			Jumlah Anak Korban Bencana Yang Diberikan Bantuan	%			100	100	100	BPBD, Dinkes, Dinas PMK, PP dan PA	
	Pelayanan Bagi Anak Penyandang disabilitas, keelompok minoritas dan terisolasi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pekayan Bagi Anak Penyandang Disabilitas	%			100	100	100	Dinsos	
		Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Keluarga Disabilitas mendapat bimbingan	%			100	100	100	Dinsos	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemberian Bantuan Alat Kesehatan bagi Anak Dengan Disabilitas	Terpenuhinya Kebutuhan Alat bantu anak dengan disabilitas	%			100	100	100	Dinsos	
		Pelayanan anak dengan disabilitas	Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan ramah disabilitas	unit			5	5	5	Dinkes	
		Pelayanan bagi Anak Disabilitas di Rehabilitasi Merdik	Jumlah Anak dengan Disabilitas yang dilayani di Instansi Rehabilitasi Merdik	%			100	100	100	Dinsos	
		Penyediaan fasilitas akses layanan dan pendampingan serta rehabilitasi bagi Anak disabilitas	Jumlah anak di Kota Sibolga	%			100	100	100	Dinsos	
		Menginisiasi Kartu Disabilitas Anak	Anak Disabilitas di Kota Sibolga	%			100	100	100	Dinsos	
		Kegiatan asesmen anak berkebutuhan khusus (bekerja sama dengan puskesmas)	Jumlah Anak Disabilitas di Kota Sibolga	Kegiata			2	2	2	Dinsos, Dinkes Dinas PMK, PP dan PA	
		Edukasi tentang hak-hak disabilitas	Masyarakat Kota Sibolga	kegiatan			2	2	2	Dinsos, Dinas PMK, PP dan PA	
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam fasilitasi rehabilitasi anak dengan disabilitas	Kelurahan dan Kecamatan se- Kota Sibolga				21	21	21	Dinsos, Dinas PMK, PP dan PA	
	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi Pencegahan Anaka Berprilaku Sosial Menyimpang Melalui Penyuluhan	Pencegahan Prilaku Sosial Menyimpang	% sekolah			100	100	100	Diknas	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		keliling									
		Fasilitasi Pencegahan dan Penangana Anak dengan Prilaku Sosial Menyimpang melalui Go To School (PGTS)	Pencegahan Prilaku Sosial Menyimpang	% sekolah			100	100	100	Diknas	
	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Pendampingan psikososial untuk ABH	Terdampingi anak berhadapan dengan Hukum	%			100	100	100	Diknas	
		Fasilitasi penangangan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai fasilitas : 1. 5 Bangunan 2. Wisma Hunian 3. Sekolah 4. Aula 5. Mesjid 6. Ruang Latihan Kemandirian 7. Perpustakaan 8. Poliklinik 9. Perkantoran 10. Sarana Bermain 11. Lapangan Sepakbola 12. Sarana Olahraga	%			100	100	100	Diknas	
		LPKA melaksanakan sekolah mandiri	Program Pendidikan yang dilaksanakann :	%			100	100	100	Diknas	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		merdeka belajar bagi Anak	1. Pendidikan Formal - SMA sebagai sekolah induk SMA Nasional - SMK sebagai sekolah induk SMK Negeri Pembangunan Pertanian Lembang SMK Negeri PU untuk jurusan otomotif 2. Pendidikan non 3. Formal Penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B bekerja sama dengan sanggar kegiatan belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kota Sibolga 4. Pelatihan Kemandirian 5. Pendidikan Keagamaan Pesantren Miftahul Jannah 6. Pendidikan Wawasan kebanggaan Pramuka, Paskibra								
			Pesantren ABH yang	%			100	100	100	Diknas	

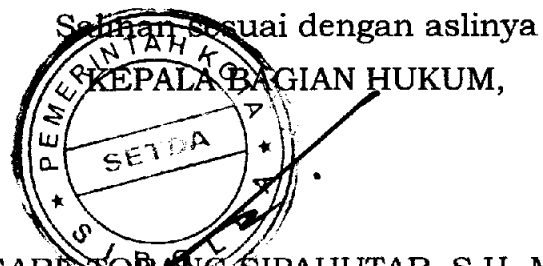
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			memperoleh layanan Hak integrasi								
		LPKA melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan Registrasi sesuai standar	%			100	100	100	Diknas	
		Mengadili Perkara dan Membuat Penetapan Yang Dimitakan Oleh Polisi dan Kejaksaan	Jumlah Kasus ABH (Pelaku) yang dilakukan Diversi dan yang Dibuat Penetapan	%			100	100	100	Diknas	
		Pendampingan Selama Proses di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan	Jumlah Kasus ABH Khusus Pelaku Yang Didampingi	%			100	100	100	Diknas	
		Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian	Diikutsertakan dalam PKBM Bekerjasama dengan LPKS	%			100	100	100	Diknas	
		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak	Memiliki Layanan Ruang Pelayanan Khusus di Kepolisian Sesuai Standar Pelayanan Minimal	%			100	100	100	Diknas	
	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Sibolga Kota Toleransi Pendampingan Psikososial Korban Stigma	Pendampingan Psikososial Korban Stigma	%			100	100	100	Diknas	
		Bantuan Sosial Yatim Piatu dan Yatim yang Orangtuanya meninggal karena	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak	%			100	100	100	Diknas	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Covid 19									
		Fasilitasi Pencegahan Anak Korban Jaringan Terorisme	Pencegahan Anak Korban Jaringan Terorisme	%			100	100	100	Diknas	

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001